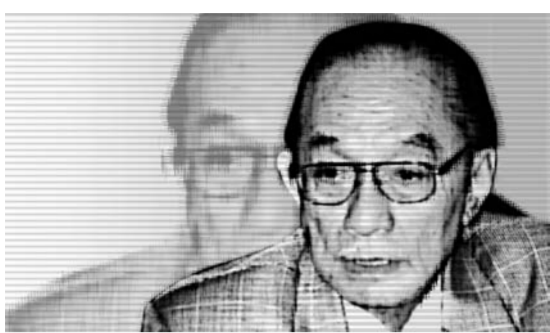


Hukum



Prof DR Satjipto Rahardjo SH

Ahli Sosiologi Hukum
Guru Besar Universitas
Diponegoro Semarang

Membalut Tangan Besi dengan Beludru

Kapolri Sutanto telah dinobatkan sebagai *People of The Year* tahun 2006 untuk ranah hukum versi SINDO. Dari hasil *polling* yang dilakukan oleh harian tersebut, Sutanto telah mengalahkan Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung), Bagir Manan (Ketua MA), dan Taufiequrachman Ruki (Ketua KPK). Saya tidak tahu alasan para responden untuk memilih Sutanto. Akan tetapi, secara objektif, sejak mulai memegang tongkat komando Kapolri, Sutanto menegakkan apa yang disebut sebagai *"community policing"* atau perpolisian masyarakat. Saya kira, kenyataan objektif tersebut tidak luput dari perhatian para responden dan mungkin menjadi (salah satu) alasan untuk memilih Sutanto.

Sutanto yang telah memilih untuk menggalakkan tipe perpolisian tersebut memang pantas disebut sebagai seorang polisi yang benar-benar peka terhadap tuntutan masyarakat. Sejak reformasi, semakin santer suara masyarakat agar polisi kembali kepada jati dirinya, yaitu melindungi dan melayani masyarakat. Sebelum itu, selama lebih dari satu generasi, polisi kita lebih menampilkan tipe perpolisian yang militeristik.

Pada 1999, keinginan masyarakat sedikit banyak terpenuhi, yaitu dengan dipisahkannya polisi Indonesia dari militer. Namun, momentum pemisahan tersebut tidak serta-merta mampu segera mengubah penampilan polisi Indonesia semudah membalik telapak tangan. Hampir satu dekade sesudah pemisahan tersebut, masih banyak praktik oleh polisi Indonesia yang bertolak belakang dari penampilan yang nonmiliteristik itu.

Bagaimanapun, apabila kita mengharapkan polisi kita segera dapat berubah dalam waktu satu-dua tahun, terlalu berlebihan. Sejak puluhan tahun menghirup atmosfer yang militeristik, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengubahnya. Seseorang memperkirakan, dibutuhkan waktu satu generasi, sedangkan yang lain meramalkan tiga generasi. Itu semua

menunjukkan, memang tidak mudah mengubah penampilan polisi yang militeristik menjadi nonmiliteristik. Jati diri polisi modern, seperti digagas oleh Robert Peel dengan *"The London Metropolitan Police"* (1829) itu, memang bersosok sipil, mulai dari pakaian sampai ke perilaku, yang harus *"look as much like civilian as possible"* (Satjipto Rahardjo, 2002).

Mengubah atau mereformasi polisi Indonesia, bukanlah melakukan perubahan formal, melainkan perubahan yang betul-betul bermakna. Hal yang diubah bukan hanya status yang semula masuk dalam kelompok militer dan kemudian dikeluarkan dari situ, tetapi mengubah polisi secara substansial, yaitu mengubah perilaku. Inilah faktor yang menyebabkan butuh waktu puluhan tahun itu.

Polisi Indonesia mestinya mewarisi sejarah perpolisian Inggris pada waktu menampilkan diri sebagai tipe polisi modern. Inggris yang demokratis merasa sangat ngeri melihat polisi di Prancis bekerja pada waktu itu. Oleh karena itu, Inggris berusaha menampilkan tipe polisi yang beda dari negeri tetangganya itu. Maka, menjadi polisi yang lebih berwatak sipil merupakan pilihan dengan agenda *"moving away from military configurations and shaking hands with the entire community"*, alias menjauhi perilaku militer dan menjadi lebih akrab dengan masyarakat.

Kalau kita membuka-buka lembaran sejarah Polri, sebenarnya ide *"community policing"* sedikit banyak juga sudah di jalankan di Indonesia sejak lebih dari satu dekade lalu. Perpolisian masyarakat atau perpolisian berbasis masyarakat itu mulai ditampilkan sebagai suatu tipe perpolisian tersendiri oleh George Kelling di Amerika Serikat (1988) sebagai *"community-oriented policing"*. Kelling menyebutnya sebagai suatu revolusi diam-diam yang membentuk sosok baru polisi Amerika Serikat. Perpolisian masyarakat menjadikan masyarakat sebagai pusat dan bukan polisi itu sendiri. Masyarakat dibiarkan

menentukan sendiri agenda apa yang ingin dijalankan dan agenda itu pula yang kemudian dilaksanakan oleh polisi.

Di Polda Jawa Tengah, pada era kepemimpinan Muslihat sebagai kapolda, ide perpolisian tersebut sebenarnya sudah dijalankan, tanpa menyebutnya secara eksplisit sebagai *"community-oriented policing"* atau *"community policing"* atau *"community policing"* atau *"community policing"*. Di Polda Jateng waktu itu, ada *"proyek babinkamtibdes"* (bintara pembina keamanan dan ketertiban desa). Sejumlah bintara direkrut dan diberi kursus kilat dengan kurikulum sipil, seperti masalah perkawinan dan pertanahan. Mereka lalu diturunkan ke desa-desa dengan berpakaian sipil tanpa kewenangan bertindak sebagai polisi, melainkan hanya mendampingi masyarakat setempat dan melaksanakan apa yang mereka kehendaki. Maka, jadilah polisi-polisi itu pendamping rapat desa, memperbaiki antena, mencari nangkahan bayi, menjadi khatib di salat Jumat, dan lain-lain. Sukses proyek tersebut dibuktikan dengan mengalirnya surat-surat puas masyarakat setempat ke alamat Polda Jateng. Sayang, sukses Polda Jateng pada waktu itu dianggap menganggu struktur kekuasaan yang ada dan proyek itu dibubarkan.

Sekarang, sekian puluh tahun setelah proyek babinkamtibdes tersebut dan sejak kepolisian keluar dari militer, Kapolri Sutanto berketetapan untuk mengangkat kembali tipe perpolisian yang berbasis masyarakat tersebut, tetapi sekarang dengan bendera yang jelas, yaitu *"community policing"* atau *"perpolisian masyarakat"*.

Sutanto telah menjadikan dirinya sebagai lokomotif yang harus menarik gerbong panjang jajaran Polri menjadi tipe polisi Indonesia yang baru. Visi perubahannya bukan main-main karena sudah mengarah kepada perubahan paradigmatik dalam perpolisian Indonesia. Dalam ranah hukum dan penegakan hukum, kita memang belum melihat visi perubahan yang begitu jelas dan progresif seperti dilakukan Jenderal

Sutanto dalam kepolisian. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, misalnya, masih lebih berkuat dengan persoalan internalnya dan belum menampilkan suatu elan perubahan yang jelas.

Apakah proses perubahan tersebut harus memerlukan waktu puluhan tahun atau tidak, tidak menjadi persoalan, karena yang penting adalah langkah permulaan harus diayunkan. Di sinilah letak keunggulan kepemimpinan Sutanto. Dia memiliki visi yang jelas dalam mengkomodasi keinginan rakyat. Disadari, dengan Sutanto sebagai Kapolri, kepolisian Indonesia sedang menapakai suatu era baru dan berada dalam situasi transisi paradigmatik.

Reformasi, demokratisasi, masyarakat madani (*civil society*), memang menghendaki suatu manajemen ketertiban yang baru, yang menjadikan masyarakat sebagai raja dan polisi sebagai pelindung dan pelayan. Polisi memang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan (*force*), tetapi kepalan tangan besi itu sekarang harus dibalut dengan beludru. Rakyat tidak boleh disakiti dan perpolisian harus menjadi berkah, bukan beban bagi masyarakat.

Sejak perubahan perpolisian tersebut adalah perubahan besar yang mendasar (paradigmatik), maka Kapolri tidak dapat bertindak dan berpikir sendiri, melainkan perlu mendapat dukungan dari para pembantunya, khususnya staf terdekatnya. Mereka ini juga perlu mampu menyerap ide perubahan tersebut, bekerja keras, agar masa transisi menuju polisi yang benar-benar sipil itu tidak berlangsung terlalu lama.

Kita mungkin jangan terlampaui berharap, dalam masa kepemimpinan Sutanto ini polisi akan beres dan benar-benar menjadi polisi sipil. Sekali lagi ditegaskan, Polri sedang memasuki suatu masa perubahan yang besar dan itu tidak bisa diselesaikan oleh Kapolri Sutanto sendiri. Masyarakat juga harus turut menjaga agar perubahan tersebut terus berlanjut dan tidak berhenti hanya pada masa kepemimpinan Sutanto. (*)



SINDO TV/D



Denny Indrayana

Doktor Hukum
Tata Negara UGM.
Ketua Pusat
Kajian Antikorupsi
Fakultas Hukum UGM.
Direktur Indonesian Court
Monitoring

Sutanto, Terus Berjuang Jenderal!

"Saya harapkan polisi bisa tetap lurus. Saya harapkan generasi muda polisi jujur"
(Hoegeng Iman Santoso).

Jenderal Sutanto dilantik menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada 8 Juli 2005. Lebih dari 17 bulan sudah sekap terjangnya. Saat dilakukan uji kelayakan di hadapan anggota DPR, Sutanto mengungkapkan programnya untuk memberantas pembalakan liar, narkoba, judi, terorisme, dan memperbaiki citra korps polisi. Saat ini, realisasi program-program berat yang beliau sampaikan tersebut sudah mulai terlihat pelaksanaannya.

Tentu saja, identifikasi kelima masalah tersebut amat tepat. Pada bagian ini, apresiasi wajib diberikan kepada Sutanto yang secara cerdas menjadikannya fokus lahan pengabdian selama masa beliau menjabat Kapolri. Kelima wilayah tersebut adalah kejahatan mahaluar biasa yang tidak hanya merendahkan dan membahayakan eksistensi kita sebagai bangsa, tetapi telah pula menggerus tingkat kepercayaan publik kepada Polri.

Sudah menjadi rahasia umum, tidak sedikit oknum Polri yang menjadi beking kejahatan mahaharam di atas. Alih-alih menjadi pemberantas kejahatan-kejahatan berat tersebut, para oknum Polri justru menjadi bagian dari mafioso kejahatan itu sendiri. Tidak ada jalan lain, pemberantasan kejahatan-kejahatan tersebut tentu harus dimulai dengan membersihkan penjahat di dalam lingkungan kepolisian sendiri. Tanpa upaya keras untuk memperbaiki lingkungan dalam Polri, segala upaya pemberantasan kejahatan—

apapun bentuknya—akan sia-sia dan membentur tembok mafia peradilan yang berpraktik di jantung kerja kepolisian sendiri.

Pada level inilah, kerja keras, ketegasan, dan kejujuran Jenderal Sutanto akan terus diuji dan berhadapan dengan banyak modus cobaan, ujian, dan tantangan. Prestasinya memang telah menyebabkan banyak penjudi tiarap. Tidak sedikit pula pabrik-pabrik obat neraka narkoba dapat dibongkar. Patut disematkan pujian yang tinggi atas prestasi ini. Demikian pula halnya dengan penanganan dan penangkapan beberapa pelaku terorisme, khususnya dengan tiadanya lagi Dr Azahari. Berkait pembalakan liar, April lalu, Sutanto berikrar, "Tidak ada lagi pencurian kayu tahun ini". Ikrar yang tentu saja sulit diwujudkan, meski bukan berarti Sutanto dan jajarannya tidak berusaha.

Kita harus *fair* mengakui bahwa untuk "negeri kampung maling," prestasi kerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sutanto tersebut adalah capaian yang luar biasa. Di negeri mafia yang semuanya bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan, melawan mafia judi, narkoba, terorisme, dan pembalakan liar tentu saja berhadapan dengan risiko "di-arsenik-kan" dan "di-munir-kan". Maka, prestasi Sutanto yang dapat melewati tantangan dan cobaan yang amat berat tersebut harus diberikan dorongan semangat dan dukungan nyata yang juga sepadan dan sewajarnya.

Hal yang paling problematik adalah penanganan profesionalisme aparat kepolisian sendiri. Terbongkarnya beberapa kasus asusila dan korupsi yang dilakukan pejabat tinggi kepolisian hanyalah satu titik dari puncak gunung es

problematis moralitas polisi. Pada level ini, Jenderal Sutanto menghadapi ujian terberatnya. Dia tidak hanya harus tegas menajutkan sanksi kepada para kerabat polisi yang bersalah, tetapi juga harus berani-jujur menjadi ustad di kampung maling.

Jenderal Hoegeng—yang pernyataannya dikutip di awal tulisan ini—adalah Kapolri yang relatif mampu menjadi lilin di tengah gelap gulitnya mental korup Polri yang mulai tumbuh di masa jabatannya. Pada eranya, segala bentuk fasilitas kemewahan yang coba disogokkan kepadanya dihadapi Hoegeng dengan penolakan tegas dan sikap bersih tanpa toleransi. Berbeda dengan kesederhanaan Hoegeng, Jenderal Sutanto menghadapi batu sandungan serius ketika dikabarkan kekayaannya meningkat Rp3,5 miliar, atau naik 150%, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Harta Sutanto pada 2001 Rp2,4 miliar, sedangkan pada Juni 2006 sudah mencapai Rp5,9 miliar. Peningkatan paling signifikan terjadi pada harta berupa giro, tabungan, dan kas lainnya. Pada klasifikasi harta tersebut, kekayaan Sutanto berubah menjadi Rp4,1 miliar dari sebelumnya hanya Rp75 juta.

Penjelasan Sutanto atas kenaikan hartanya yang amat besar itu masih belum memadai. Humas Mabes Polri menjelaskan bahwa kenaikan drastis tersebut karena gaji Sutanto tetap utuh dan beliau menerima tunjangan dari beberapa yayasan di bawah Polri. Penjelasan sederhana demikian menimbulkan banyak tanda tanya dan keraguan. Karena, seharusnya yayasan adalah lembaga nonprofut yang tidak menghamburkan uang mencapai miliaran rupiah untuk tunjangan sang jenderal. Kalaupun membagi rezeki, yayasan di bawah

Polri seharusnya lebih mengutamakan para polisi level kopral yang memang membutuhkan tunjangan kesejahteraan.

Ketidakjelasan peningkatan harta kekayaan tersebut akan mengurangi kadar prestasi emas yang sedang diukir Sutanto. Lebih berat lagi jika menyadari bahwa dengan gelayutan amanah harta yang tidak ter jelaskan tersebut, Sutanto harus membersihkan jajaran Polri yang masih dirundung praktik nista mafia peradilan. Sewajibnya, mau tidak mau, Sutanto harus meng-Hoegeng: menjadi sosok polisi yang tidak hanya tegas dan berani, namun juga jujur dan sederhana.

Memberantas korupsi di internal kepolisian seharusnya adalah fokus kerja Sutanto di masa depan. Tantangannya tentu sudah membentang luas. Hasil survei Transparency International (TI) beberapa waktu lalu menetapkan polisi sebagai institusi terkorup setelah DPR dan peradilan (hakim dan jaksa). Untuk merombak kultur kerja koruptif di kepolisian tersebut, Sutanto ada baiknya meniru langkah Inggris di abad ke-19 yang menyusupkan intel polisi untuk mengintai praktik korupsi di setiap unit kepolisian. Cara demikian akhirnya sukses membongkar kebusukan korupsi polisi Inggris.

Akhirnya, kepada Sutanto, harus diucapkan selamat atas prestasinya yang spektakuler, sambil membisikkan *tausiyah* bahwa hartanya harus lebih terjaga dari sumber yang koruptif. Jenderal Sutanto, maju terus! Hati-hatilah agar tidak terjerebab pada godaan ketenaran dan kekayaan. Seandainya Hoegeng bertemu Sutanto, maka dia akan berpesan, "Saya harapkan Sutanto bisa tetap lurus. Saya harapkan Sutanto menjadi polisi jujur". (*)



SINDO/DK

Kiprah Sutanto

Jenderal Beraksi, Cukong pun Lari



Sutanto

Sejak 8 Juli 2005, Jenderal Pol Sutanto resmi menjadi Kapolri ke-17, beberapa hari setelah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merayakan ulang tahun ke-60. Tujuh belas bulan sudah Sutanto memangku jabatannya. Dia berusaha mewujudkan agenda besar yang dia rencanakan, yakni memberantas pembalakan liar (*illegal logging*), narkoba, judi, terorisme, dan memperbaiki citra korps polisi.

Bukan isapan jempol bila janji Sutanto saat masih menjalani *fit and proper test* di depan anggota DPR dibuktikan setelah naik podium. Babak baru dimulai, Sutanto tidak pandang bulu, teman seprofesi atau sejumlah kolega pun diproses hukum jika terindikasi bersalah.

Sutanto sudah memenjarakan mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suyitno Landung dan mantan Direktur Ekonomi Khusus Polri Brigjen Pol Samuel Ismoko karena kasus suap dalam perkara pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru. Belakangan, Sutanto juga mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara Edhy Soesilo dan Kapolwil Bogor Kombes Pol Tjiptono akibat kasus pelecehan seksual. Dia ditakuti para anggota Polri, terutama yang nakal.

Sutanto membuka babak kepemimpinannya dengan menabuh genderang perang pada dunia perjudian. Dia tidak segan-segan mencopot para kapolda jika tidak becus membersihkan perjudian. Bandar judi seakan mafhum dan melempar handuk putih. Sejumlah kawasan yang sebelumnya ingar-bingar oleh perjudian tiba-tiba redup. Cukong judi di Jakarta, Medan, dan Batam memilih tiarap.

Sutanto, perwira polisi seangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Angkatan Bersenjata RI 1973, juga tak mau main-main dengan bandar narkoba. Sejumlah pabrik pembuatan narkoba, termasuk yang terbesar ketiga Asia di Cikande, Serang, Banten, dibongkar. Razia narkoba dilanjutkan dengan menyisir tempat hiburan hampir setiap malam.

Sutanto kemudian melangkah memasuki hutan belantara. Dia membidik cukong *illegal logging*, termasuk mereka yang dibekingi polisi. Tanpa ampun, Sutanto terus mengejar para cukong kayu itu hingga akhirnya Sutanto berani mengatakan tidak ada lagi maling kayu.

Dari data yang dimiliki Polri, pada 2005, mereka menuntaskan 985 kasus pembalakan liar dengan 1.229 tersangka di seluruh Indonesia. Sebanyak 85 ribu kayu gelondongan dan 27 ribu meter kubik kayu disita. Selain itu, terdapat 117 unit kapal, 363 truk, 73 alat berat, dan 37 set mesin pemotong kayu juga berhasil diamankan. Laporan Sutanto dua bulan pertama 2006 di depan anggota DPR mengatakan, lebih dari 500 orang terlibat pembalakan liar. Sutanto benar-benar bencana bagi para penjahat.

Sosok pekerja keras ini dikenal temannya sebagai orang yang mampu mengendalikan emosi. Di mata seorang perwira seangkatannya, Sutanto adalah sosok pemimpin yang ideal. Jauh sebelum namanya muncul, saat masih menjadi perwira menengah, dia dikenal pantang menerima imbalan atau dana "Alibaba". "Dia rela berjalan kaki dan turun naik bus semasa kami sama-sama bertugas di Surabaya," kata rekan Sutanto itu tanpa ingin namanya dipublikasikan.

Atas sederet catatan bagus itu, apresiasi untuk Sutanto pun bermunculan. "Saat ini, anggota polisi tidak berani berbuat macam-

macam karena tidak ada lagi pilihan selain sanksi atau pencopotan dari anggota Polri jika terbukti bersalah," tutur pengamat hukum dan kepolisian dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala.

Kepemimpinan Sutanto, kata Adrianus, berbeda dengan era mantan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar. Di era Da'i, Adrianus melihat kebijakan lebih mengutamakan sisi pembangunan dan infrastruktur, Sutanto lebih menekankan pada peningkatan anggaran operasional, mulai dari pengadaan helikopter, mobil patroli, atau aneka macam teknologi kepolisian yang mendukung penegakan hukum.

Ahli Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji juga melihat penanganan perkara pidana yang telah diselesaikan Sutanto sudah baik. Banyak kasus yang menarik perhatian masyarakat berhasil dituntaskan. "Permasalahan perkara pidana yang membawa jenderal aktif ke pengadilan merupakan barometer menentukan keberhasilan Sutanto," terangnya.

Akan tetapi, tidak semua rapor Sutanto dianggap gemilang. Ada pula angka merahnya. Menurut dosen Pascasarjana Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar, secara menyeluruh, konteks sistem kepolisian era Sutanto belum banyak yang dijangkau, terutama soal penerapan struktur dan manajemen. Pada sisi lain, penempatan personel pada sebuah divisi instansi Polri masih didasari pertimbangan personal.

Aspek penanganan hukum pun dianggapnya belum optimal dan masih terbawa kepentingan politik. Polisi belum murni melakukan penegakan hukum sebagai lembaga independen. Dia memberi contoh penanganan korupsi Bantuan

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ketika beberapa waktu lalu Wakabareskrim Irjen Pol Gorries Mere membawa salah satu debitor ke Istana Negara.

Padahal, menurut dia, Polri bertugas sebagai penegak hukum dan tidak seharusnya mencampuri urusan politik dengan membawa para debitor ke Istana. "Itu bukan pekerjaan polisi. Polisi itu penegak hukum, bukan penagih utang," katanya. Kasus lain yang disebut Bambang adalah pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru yang melibatkan Adrian Waworuntu dkk. Dia melihat, kasus ini tidak total karena ada beberapa pelaku yang tidak tersentuh hukum, baik di kalangan perbankan maupun kalangan internal kepolisian. "Ini yang saya katakan ada tebang pilih," ujarnya.

Perbedaan ekonomi yang sangat jauh antarpetinggi Polri dan jajaran bawahannya juga masih menjadi *handicap* Sutanto. Dia dianggap belum mampu menyahterakan anggotanya. Di lapisan atas, perwira utama Polri bergelimang kemewahan, sementara bawahannya hidup pas-pasan. Belum lagi, masih ada istilah penempatan "divisi basah" dan kering pada instansi Polri yang harusnya bisa diatasi.

Secara makro, menurut Bambang, belum ada perubahan yang menunjukkan pendekatan polisi sebagai penegak hukum dan pembina kamtibmas pada masyarakat. Dalam melakukan tugasnya, polisi masih cenderung represif dan memperlihatkan kekuatannya ketimbang sisi humanisnya.

Bambang melihat, Polri seakan hanya memosisikan diri sebagai pencegah tindak kriminal (*imperis*), sedangkan akar permasalahan terjadinya pidana tidak mampu dicegah. Koordinasi

antarbeberapa departemen dan kepolisian tidak terjadi, hingga masing-masing berjalan sendiri.

"Anekdote Polri sebagai pemadam kebakaran bisa dibenarkan. Polri melakukan penegakan hukum setelah ada kejadian. Tapi untuk pencegahan, belum ada kemampuan," tegas Bambang.

Ketua Indonesia Police Watch Neta S Pane mengamati, Sutanto sudah tidak lagi konsisten dengan kepemimpinan pada saat pertama menjabat. Dari segi penempatan, Sutanto banyak mengangkat personel yang tadinya bermasalah pada jabatan strategis. Selain itu, beberapa kasus kecil dibiarkan mengambang, seperti kasus pelecehan seks yang melibatkan Kapolwil Bogor Kombes Pol Tjiptono atau kasus penganiayaan yang melibatkan mantan Kapolwil Bogor Kombes Bambang Wasgito yang menjabat sebelum Tjiptono. "Kapolri juga tidak menyelesaikan kasus 15 rekening, kasus alkomjarkom dan pembunuhan Munir," kata Neta.

Di antara baik dan buruk Sutanto, semua sepakat masih banyak pekerjaan rumah yang harus digarap pria kelahiran Comal, 56 tahun lalu itu. Antrian kasus itu, antara lain, penanganan korupsi, pengejaran daftar pencarian orang (DPO), pengejaran teroris kelompok Noordin MTop, dan kerusakan di daerah yang menunggu penuntasan.

Menanggapi tugas yang diembannya, Kapolri Jenderal Pol Sutanto meminta semua pihak melihat persoalan yang terjadi secara menyeluruh. "Petugas di lapangan sudah bekerja keras. Jangan sampai, karena masalah lain Polri dianggap tidak bekerja. Kita juga telah banyak menuntaskan kasus besar lainnya," kata Sutanto. (*hermanto*)



Saat ini, anggota polisi tidak berani berbuat macam-macam karena tidak ada lagi pilihan selain sanksi atau pencopotan dari anggota Polri jika terbukti bersalah